

**ETIKA DAN AKUNTABILITAS GAYA KEPEMIMPINAN ETIS, STUDI
KASUS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PIMPINAN DALAM MENJAGA
TRANSPARANSI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP
DAMPAK BENCANA BANJIR BANDANG DI KELURAHAN DADOK
TUNGGUL HITAM**

Aina Ilzahra¹, Alexa Rheva Anggela², Aminatussalsabila³, Azahra Naima Puti Azka⁴,
Dafina Permata Dasti⁵, Dinda Azzahra Putri⁶, Elsy Dwi Septiyena⁷, Syamsir⁸.

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Alamat Email : ainailzahra@gmail.com¹, alexarheva@gmail.com²

aminatussalsabila13@gmail.com³ naiioyyazka@gmail.com⁴

permatadastidafina@gmail.com⁵ dindaazzahraputri97@gmail.com⁶

elsyadwiseptiyena@gmail.com⁷ syamsir@fis.unp.ac.id⁸

ABSTRAK

Fenomena bencana banjir bandang di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam menempatkan efektivitas kepemimpinan publik pada titik kritis, di mana integritas moral dan akuntabilitas menjadi instrumen vital dalam pengelolaan bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi gaya kepemimpinan etis, mengevaluasi proses pengambilan keputusan dalam menjaga transparansi, serta mengukur tingkat akuntabilitas publik dalam penyaluran bantuan sosial pasca bencana. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemimpin lokal mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran dan keadilan di tengah tekanan situasi darurat. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Lurah, aparat kelurahan, relawan, dan masyarakat terdampak, serta didukung oleh observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Etis, Akuntabilitas, Transparansi*

ABSTRACT

The flash flood disaster in Dadok Tunggul Hitam Village has placed the effectiveness of public leadership at a critical juncture, where moral integrity and accountability are vital instruments in the management of social assistance. This study aims to analyze the implementation of ethical leadership styles, evaluate the decision-making process in maintaining transparency, and measure the level of public accountability in the distribution of post-disaster social assistance. Using qualitative methods with a case study approach, this research explores how local leaders integrate the values of honesty and justice amidst the pressures of emergency situations. Data were collected through in-depth interviews with key informants such as the village head, village officials, volunteers, and affected communities, supported by participant observation and documentation studies. Data analysis was conducted using an interactive model that includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Keywords: *Ethical Leadership, Accountability, Transparency*

PENDAHULUAN

Gaya kepemimpinan yang menekankan pada etika merupakan dasar yang sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang jujur, terbuka, serta memiliki integritas, terutama ketika organisasi dihadapkan pada situasi mendesak seperti bencana alam. Di lingkungan administrasi publik masa kini, seorang pemimpin tidak hanya bertugas untuk mengelola dan menggerakkan birokrasi, tetapi juga memiliki beban moral untuk menjadi contoh etika bagi stafnya dan masyarakat secara keseluruhan. **Brown, Trevino, dan Harrison (2005)** mendefinisikan kepemimpinan etis sebagai proses di mana pemimpin memengaruhi bawahan melalui norma-norma yang etis, komunikasi standar perilaku yang jelas, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran etika. **Yuki(2017)** juga menekankan bahwa karakteristik utama adalah kemampuan memengaruhi perilaku etis orang lain melalui nilai-nilai organisasi.

Trevino et al. (2003) menyoroti bahwa pimpinan etis dalam krisis bencana harus memprioritaskan kecepatan keputusan, koordinasi dan transparansi informasi public yang di gunakan untuk membangun kepercayaan. Pelaksanaan akuntabilitas dalam distribusi bantuan sosial adalah contoh nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga hak-hak dasar warganya. Keterbukaan di sini lebih dari sekadar ketersediaan data di papan pengumuman, namun juga memastikan bahwa setiap langkah distribusi dapat diakses, dipahami, dan dimonitor oleh masyarakat untuk meminimalkan risiko penyimpangan yang sering terjadi pada dana darurat.

Syakhroza (2005) menjelaskan

bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan secara teratur. Di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, rumitnya proses distribusi bantuan sering dipengaruhi oleh berbagai kendala teknis, seperti verifikasi data penerima yang kadang bertumpuk serta potensi konflik antar warga. Oleh karena itu, pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan berbasis etika biasanya lebih memilih untuk membangun komunikasi dua arah dan berbagi informasi secara terbuka. Pendapat **Pasolong (2007)** sejalan dengan hal ini, yang menekankan bahwa gaya kepemimpinan ideal di sektor publik harus mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, moral, serta administratif.

Di samping aspek akuntabilitas yang formal, dimensi etika dalam kepemimpinan juga berfungsi sebagai perlindungan psikologis dan struktural terhadap praktik maladministrasi yang dapat dengan mudah terjadi dalam keadaan darurat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Keputusan dari pemimpin di tingkat kelurahan menjadi ujung tombak di lapangan untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada yang berhak tanpa adanya diskriminasi, favoritisme, atau intervensi kepentingan politik tertentu. **Wahyudi (2013)** menekankan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, nilai-nilai etika harus menjadi panduan moral utama agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan rasa keadilan dan martabat masyarakat. Melalui analisis mendalam mengenai penanganan banjir bandang di Dadok

Tunggul Hitam, dapat dilihat dengan jelas bahwa keberhasilan dalam penyaluran bantuan sangat tergantung pada kemampuan pemimpin menjaga integritas di tengah tekanan krisis yang ekstrem. Seorang pemimpin yang etis memandang jabatan tidak sebagai sarana untuk meraih kekuasaan, melainkan sebagai amanah untuk melayani, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak yang sering kali diabaikan dalam proses birokrasi distribusi bantuan yang terlalu kaku.

Lebih jauh lagi, dalam situasi darurat, keputusan yang tegas memerlukan keberanian dari para pemimpin untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan audit sosial. Keterbukaan ini mencakup publikasi mengenai rincian logistik, kriteria dalam pemilihan penerima bantuan, hingga laporan pemakaian anggaran bantuan secara teratur. **Kumorotomo (2011)** mengungkapkan bahwa etika dalam administrasi publik sangat vital untuk memberi arahan bagi birokrat agar tetap fokus pada kepentingan masyarakat dan menghindari godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Di daerah seperti Dadok Tunggul Hitam, yang memiliki tingkat interaksi sosial yang tinggi, integritas pemimpin dalam menyelaraskan data dari tingkat RT/RW hingga kelurahan merupakan kunci sukses dalam mengurangi dampak bencana. Jika pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter atau tertutup, maka hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat dan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Sebaliknya, dengan mengintegrasikan nilai-nilai transparansi dalam gaya kepemimpinan sehari-hari, pemimpin kelurahan dapat menciptakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, yang memungkinkan proses pemulihan setelah bencana

berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, tantangan terbesar dalam mempertahankan etika dan akuntabilitas di sektor publik adalah keselarasan antara pernyataan dan tindakan pemimpin di lapangan. Kepemimpinan yang beretika tidak hanya berfokus pada peraturan administratif di atas kertas, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai kejujuran dan empati diimplementasikan dalam tindakan nyata saat masyarakat menghadapi situasi sulit. **Sinambela (2006)** menyatakan bahwa reformasi dalam pelayanan publik hanya akan berhasil jika diikuti dengan perubahan sikap birokrat yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan menerapkan standar etika yang tinggi, pemimpin di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bantuan, tetapi juga sebagai pengembalian harapan bagi masyarakat yang terpengaruh oleh banjir.

Peran moral dalam struktur pemerintahan birokrasi merupakan elemen krusial yang berfungsi sebagai pengatur internal bagi setiap individu yang mengabdikan diri di negara saat menjalankan kekuasaan mereka. Ketika banjir melanda Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, seorang kepala kelurahan menghadapi tekanan besar dari masyarakat serta keterbatasan sumber daya, yang sering kali menciptakan celah bagi penyalahgunaan jika tidak diimbangi oleh kepemimpinan yang beretika. **Hardiyansyah (2011)** berargumen bahwa kualitas layanan publik sangat tergantung pada kemampuan aparat untuk memasukkan nilai-nilai kesopanan, penghormatan, dan keadilan dalam setiap hubungan mereka dengan masyarakat.

Kepemimpinan yang etis dalam situasi ini tidak hanya tentang mengikuti aturan yang tertera dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi juga melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, masyarakat, dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kewajiban untuk akuntabilitas dalam distribusi bantuan sosial sering terhalang oleh masalah klasik di birokrasi, seperti data yang tidak akurat dan lambatnya proses verifikasi lapangan. Kepemimpinan yang etis mengharuskan seorang pemimpin untuk bertindak proaktif, melakukan pendekatan kepada masyarakat, dan memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam proses pencatatan setelah bencana. akuntabilitas publik tidak hanya bersifat administratif dan vertikal kepada atasan, tetapi juga harus bersifat horizontal kepada masyarakat yang dilayani. Di Dadok Tunggul Hitam, keterbukaan informasi harus diwujudkan dalam bentuk transparansi mengenai jenis bantuan yang diberikan, total anggaran yang dialokasikan, serta mekanisme pengaduan jika terdapat masalah di lapangan. Tanpa keterbukaan ini, sosial stigma serta potensi konflik antara warga dapat muncul, yang justru dapat menghalangi pemulihan daerah secara keseluruhan.

Selanjutnya, pengambilan keputusan di saat darurat sering kali melibatkan area yang tidak jelas antara kebijakan diskresi dan peraturan hukum yang kaku. Dalam konteks ini, integritas pemimpin diuji untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. **Widjaja (2003)** mengatakan bahwa otonomi pada tingkat desa atau kelurahan seharusnya memberikan kesempatan kepada pemimpin lokal untuk lebih

responsif terhadap kebutuhan khusus masyarakat, sambil tetap berada dalam pengawasan yang ketat. Pemimpin di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan tokoh masyarakat serta ketua RT/RW, sehingga penyerahan bantuan sosial bisa tepat sasaran. Keputusan yang diambil melalui musyawarah dan keterbukaan akan memiliki legitimasi moral yang lebih kuat dibandingkan dengan keputusan yang dibuat secara tertutup di dalam ruang kantor kelurahan.

Penguatan terhadap pengawasan baik eksternal maupun internal sangat penting untuk mempertahankan konsistensi dalam penerapan gaya kepemimpinan yang beretika dalam jangka panjang. Transparansi tidak hanya sebatas memberikan informasi, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengevaluasi kinerja para pemimpin. Hal ini sejalan dengan pemikiran New Public Service yang dijelaskan oleh para pakar administrasi publik, yang menekankan bahwa tujuan utama pemerintah adalah untuk melayani rakyat dan bukan hanya mengelola aparatur. **Thoha (2003)** menekankan bahwa perilaku birokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan yang ada. Oleh sebab itu, membangun budaya kerja yang transparan dan bertanggung jawab di tingkat kelurahan setelah terjadinya banjir di Dadok Tunggul Hitam akan menjadi pondasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota Padang di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena memungkinkan peneliti memahami

makna, persepsi, dan proses pengambilan keputusan dari perspektif aktor utama seperti Lurah dan aparat kelurahan. Pendekatan studi kasus menurut Yin (2018) transparansi penyaluran bantuan social di tengah keterbatasan sumber daya dan tekanan sosial. Fokus tunggal pada satu kelurahan memastikan analisis kontekstual yang kaya tanpa membandingkan banyak kasus.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada salah satu staff pegawai kelurahan yang menjadi penanggungjawab forum siaga bencana di Kecamatan Koto Tengah dan ketua siaga bencana di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dengan beberapa pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pimpinan dalam mengelola bantuan sosial bencana banjir bandang di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Selain itu, penerapan upaya dalam tranparansi dan akuntabilitas yang menjadi focus pembahasan yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan saran dalam mewujudkan cara pengambilan keputusan pimpinan dalam menjaga tranparansi dalam penyaluran bantuan sosial terhadap dampak bencana banjir bandang. Analisis terhadap teori dan pernerapan yang didapat melalui penelitian langsung, serta buku dan jurnal yang terkait dijadikan sebagai poin pembahasan terdapat beberapa hal yang di perlu di pertimbangan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Implementasi dan Transparansi Kebijakan gaya kepemimpinan etis pimpinan di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dalam mengelola bantuan sosial pasca bencana banjir bandang.**

Kusumanegara (2010;99)

implementasi diartikan sebagai output, yaitu melihat aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau mengalami penyimpangan. Sebuah produk kebijakan (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota) dirumuskan untuk Implementasi Kebijakan Publik intervensi persoalan, politik, sosial, ekonomi, hukum dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Untuk mengakomodir hak politik warga negara, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana masyarakat dijamin kebebasannya berserikat dan berkumpul dalam memanfaatkan hak politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Strategi mengatasi persoalan-persoalan sosial seperti tingginya angka pengangguran di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Agar masyarakat berpartisipasi secara aktif sebagai pelaku ekonomi kreatif baik perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif, pemerintah membuka akses seluas-luasnya dan mengakomodir kepentingan tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan masih banyak kebijakankebijakan lainnya yang

diperuntukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut **Wibawa (1994:34)**, kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak. Pernyataan ini melekat dua makna sekaligus, yaitu: pertama, kebijakan adalah hanya sebuah dokumen politik apabila ia tidak diikuti dengan tindakan konkrit. Sebab kebijakan dirumuskan untuk mengakomodasikan tuntutan berbagai pelaku dan itu berarti bahwa kebijakan memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kondisi masa depan guna memuaskan kepentingan berbagai pelaku tersebut. Kedua, birokrasi pemerintah hanya akan bertindak kalamana ada kebijakan tertentu (yang telah terlegitimasi). Birokrasi selalu mencari pijakan hukum bagi setiap tindakannya.

1.1 Input Kebijakan

Input kebijakan adalah upaya demokratis yang merujuk pada pemberian masukan serta penilaian terhadap sumber daya pendukung yang diperlukan untuk melahirkan suatu kebijakan. Berdasarkan riset yang dilakukan bahwa di Dadok Tunggul Hitam sudah menerapkan asas musyawarah dengan masyarakat yang ada di sekitaran lokasi untuk mencari data korban terdampak banjir bandang agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan atau bully-an dari masyarakat di zaman canggih ini. Terdapat 4 RW yang terdampak cukup parah, di

mana kedalaman banjir hingga setengah badan, maupun setengah rumah warga, terutama di Parak Jambu, Maransi, DPR Ujung, Rawang, dan Aliran anak sungai. Kebijakan Kelurahan tentang bantuan sosial ini sudah mencakup prosedur dan tanggung jawab dengan melibatkan RT, RW, dan masyarakat setempat untuk menyalurkan bantuan sosial. Aspek transparansi kebijakan yang diambil agar masyarakat mengetahui penyaluran yang adil dan merata, serta menentukan mana yang paling diprioritaskan sesuai dengan kondisi yang darurat.

Kelurahan Dadok Tunggul Hitam menyediakan 1 posko induk, 5 posko dapur umum, dan 1 gudang bantuan guna menampung dan menyalurkan beberapa bantuan sosial dari berbagai pihak, baik pemerintahan, swasta, maupun perorangan. Bahan mentah di kumpulkan di posko induk, lalu di salurkan ke beberapa titik dapur umum yang tersebar di wilayah terdampak, agar distribusi lebih cepat dan teratur. Prioritas bantuan yang disalurkan yang paling utama wilayah yang airnya surut paling lama seperti Maransi, dan Parak Jambu. Disana air bisa mengenang berhari-hari **Bapak Yulisman S.Sos** mengatakan “ Bahwa masyarakat tidak butuh beras atau mie instan saat puncak banjir, karna mereka tidak bisa memasak. Kompor mereka terendam, gas mereka basah, maka focus utama kami adalah mereka bisa langsung makan, masakan yang sudah jadi saja”. Sistem penyaluran

bantuan yang dilakukan satgas bencana Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dilakukan dengan cara menghitung berdasarkan data Kartu Keluarga (KK) bukan per rumah, karena satu rumah bisa ada dua sampai tiga keluarga. Kemudian pihak kelurahan menghimbau RT/RW setempat untuk mendata jumlah Kartu Keluarga (KK) agar jumlah bantuan yang di salurkan sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh pihak kelurahan, sehingga bantuan yang akan di salurkan bisa disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan tiap RT/RW.

1.1 Proses Kebijakan

Proses menfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan kebijakan dari keputusan yang sudah ditetapkan menjadi tindakan nyata di lapangan, dalam konteks bantuan sosial bencana banjir di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, proses ini meliputi pendataan warga terdampak, verifikasi penerimaan bantuan, penyaluran bantuan, pengawasan pelaksanaan, dan evaluasi hasil pelaksanaan. Implementasi yang baik membutuhkan komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, dan prosedur yang sesuai agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Proses kebijakan implementasi dan transparansi kebijakan dalam bantuan sosial bencana banjir mencakup

serangkaian tahapan mulai dari pendataan penerima bantuan, penyaluran bantuan, pengawasan pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan kebijakan. Proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dengan cara mengumpulkan bantuan sosial dari berbagai pihak di posko induk, yang kemudian disalurkan ke beberapa titik posko yang telah disediakan oleh pihak kelurahan.

1.2 Output Kebijakan

Output kebijakan adalah hasil nyata yang diperoleh dari pelaksanaan suatu kebijakan setelah proses implementasi dilakukan. Dalam konteks implementasi dan transparansi kebijakan bantuan sosial bencana banjir, output kebijakan dapat dilihat dari tercapainya penyaluran bantuan kepada masyarakat berdampak, ketepatan sasaran penerima, serta keterbukaan informasi mengenai mekanisme bantuan. Output kebijakan yang baik menunjukkan bahwa sebuah kebijakan itu berjalan sesuai dengan tujuan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan diterima oleh masyarakat.

Pada aspek implementasi kebijakan, bantuan sosial tersalurkan secara cepat, tepat, dan merata kepada warga yang terdampak banjir. yang efektif dan ditansai oleh adanya koordinasi antar instansi, kejelasan prosedur, dan kesiapan sumber daya pelaksana. Sementara itu Informasi mengenai data penerima bantuan, jumlah bantuan yang disalurkan, dan proses pendistribusian kepada masyarakat terjalankan dengan

baik dan akan meningkatkan kepercayaan public serta meminimalkan potensi pentumpangan dalam penyaluran bantuan sosial.

2. Hambatan dan Tantangan yang dihadapi pimpinan dalam menerapkan gaya kepemimpinan etis untuk menjaga transparansi penyaluran bantuan di tengah tekanan situasi darurat.

Hambatan dalam konteks kepemimpinan yang etis adalah faktor-faktor yang menghalangi atau menghambat penerapan etika dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, seperti kurangnya pengawasan, ambiguitas akuntabilitas, dan tekanan politik yang dimana kondisi struktural, situasional atau sosial yang menyebabkan kebijakan atau prinsip etis itu sulit dilaksanakan secara konsisten, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial (Ulum dan Pro Bisnis 2024). Tantangan juga lebih merujuk pada kondisi luar biasa yang menuntut pemimpin untuk beradaptasi tanpa mengorbankan integritas, misal mengorbankan, tekanan waktu dan konflik kepentingan dalam situasi darurat. Tantangan juga bukan penghalang, namun juga peluang yang memuji kompetensi etis, keberanian dan kemampuan untuk berpikir kritis.

Salah satu hambatan yang paling utama yang dialami tim satgas kelurahan Dadok Tunggal Hitam adalah tim satgas hanya memiliki 1 unit perahu karet untuk menjangkau berbagai lokasi banjir.

Sementara, beberapa lokasi banjir yang terdampak tersebar di banyak tempat, bahkan beberapa di antaranya berada cukup jauh dan memiliki kondisi genangan yang parah. Situasi ini membuat proses distribusi bantuan menjadi jauh lebih sulit karena petugas harus membagi waktu, tenaga, dan logistik ke lokasi yang berbeda-beda. Akibatnya, penyaluran bantuan makanan tidak dapat dilakukan secepat yang diharapkan, terutama pada saat evakuasi warga dan pengiriman makanan kepada masyarakat yang masih terisolasi oleh banjir. Dalam kondisi ini, pimpinan dituntut untuk tetap menjalankan prinsip kepemimpinan etis, yaitu bersikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan transparan dalam pengambilan keputusan. Namun, tekanan situasi darurat seringkali membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks. Pimpinan harus menentukan mana yang di prioritaskan mendapatkan bantuan di wilayah yang paling parah terdampak, serta bagaimana memastikan bahwa bantuan yang terbatas tersebut dibagikan secara merata dan tepat sasaran tanpa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, hambatan utama dalam penerapan gaya kepemimpinan etis pada situasi darurat banjir ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kemampuan pimpinan dalam menjaga kepercayaan publik, keterbatasan transportasi, banyaknya titik banjir, serta kesulitan menjangkau lokasi

banjir menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi dengan keputusan yang cepat, adil, dan transparan agar penyaluran bantuan berjalan sesuai tujuan dan harapan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan etis menjadi faktor penentu dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial pasca banjir bandang di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Pemimpin lokal yang mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan mampu membangun kepercayaan masyarakat serta meminimalkan konflik sosial. Implementasi kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah RT/RW terbukti efektif dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Hambatan teknis seperti keterbatasan sarana distribusi tidak mengurangi komitmen etis pemimpin, melainkan menjadi ujian integritas dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan etis bukan hanya konsep normatif, tetapi praktik nyata yang menentukan keberhasilan manajemen krisis di tingkat lokal.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepemimpinan etis dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial pasca banjir bandang di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan bagi berbagai pihak:

1. Untuk Pemimpin Kelurahan dan Aparat Lokal

Pemimpin kelurahan perlu memperkuat mekanisme audit sosial dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan distribusi bantuan. Transparansi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui laporan administratif, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk keterlibatan warga dalam setiap tahapan penyaluran.

2. Untuk Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung kelurahan dengan menyediakan sarana transportasi darurat tambahan, seperti perahu karet atau kendaraan khusus, agar distribusi bantuan dapat menjangkau seluruh titik banjir secara cepat dan merata. Pemerintah juga perlu mengadakan pelatihan rutin bagi aparat kelurahan mengenai kepemimpinan etis, manajemen krisis, dan komunikasi publik. Dengan adanya pelatihan ini, aparat akan lebih siap menghadapi situasi darurat dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang transparan dan akuntabel.

3. Untuk Masyarakat yang Terdampak

Masyarakat terdampak bencana diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pendataan, musyawarah RT/RW, serta pengawasan distribusi bantuan. Keterlibatan warga akan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan

mengurangi potensi konflik sosial.

4. Untuk Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini membuka peluang bagi akademisi untuk mengembangkan kajian lebih luas mengenai kepemimpinan etis dalam manajemen bencana. Studi komparatif di berbagai kelurahan atau daerah lain dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang penerapan nilai-nilai etika dalam situasi darurat. Kajian mendalam mengenai pengaruh budaya lokal terhadap efektivitas kepemimpinan etis juga dapat memperkaya literatur administrasi publik di Indonesia. Selain itu, akademisi dapat menyusun model konseptual kepemimpinan etis dalam penanggulangan bencana, yang nantinya dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih berintegritas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Brown, M.E., Treviño, L.K., & Harrison, D.A (2005). *Ethical Leadership: A Social Learning Perspective for Construct Development and Testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- DeHoogh, A.H.B., & Den Hartog, D.N. (2009). Neuroticism, Extraversion, Openness, and Agreeableness. *Journal of Applied Psychology*.
- Dwiyanto, A (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hardiyansyah (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Haryatmoko (2011). *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia (2020). *Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kumorotomo, W (2011). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kusumanegara, S (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyadi, D (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Kota Padang (2025). *Serap Aspirasi Warga Dadok Tunggul Hitam, Pemko Padang Fokuskan Penanganan Banjir*. Padang: Pemerintah Kota Padang.
- Republik Indonesia

- (2007).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (2021).
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Sinambela, L. P (2006).
Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi.
Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syakhroza, A (2005). *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan.*
- Thoha, M (2003). *Perilaku Organisasi (Jilid 1 dan 2).* Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Wahyudi (2013). (Referensi spesifik terkait etika kepemimpinan publik).
Widjaja (2003). *Otonomi Desa.*
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses.* Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wirata, G. & Artayasa, I.M. (n.d.). *Etika Administrasi Publik.* Universitas Riau. Diakses dari:
[http://repo.unr.ac.id/869/1/BUKU%20CETAK%20ETIKA%20ADMINISTRASI%20PUBLIK%20%20\(1\).pdf](http://repo.unr.ac.id/869/1/BUKU%20CETAK%20ETIKA%20ADMINISTRASI%20PUBLIK%20%20(1).pdf)
- Yukl, G (2017). *Leadership in Organizations.* Pearson.